

**DAMPAK PROGRAM BANTUAN SOSIAL YANG DIKELOLA
PEMERINTAH KALURAHAN TERHADAP REDUKSI KEMISKINAN
(Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

ANISSA FEBRIYANTI

NIT: 22314316

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Poverty in rural areas remains a problem due to limited income, ownership of productive assets, and dependence on the agricultural sector. The government implements the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), and Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) as forms of social protection managed under the authority of the Pucung Village Government. This study aims to analyze the impact of social assistance programs on poverty reduction, the obstacles to their implementation, and the solutions implemented by the Pucung Village Government.

This study used qualitative methods with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with Pucung Village Government officials, social assistance recipients, and those who did not receive social assistance. Data analysis was conducted using thematic analysis.

The results indicate that social assistance programs are effective in improving the fulfillment of basic needs, reducing expenditure burdens, enhancing food security, and providing protection for vulnerable households. However, these programs have not been able to reduce poverty sustainably due to limited productive assets, dependence on the agricultural sector, and unstable incomes, along with the problem of inaccurate targeting due to inclusion and exclusion errors. The Pucung Village Government addressed these obstacles through tiered data collection and verification, recipient data updates, Village Deliberations to determine BLT-DD, and community empowerment through MSME development, skills training, and dissemination of job opportunity information.

Keywords: *social assistance, poverty reduction, Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD), Village Government*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Literatur.....	9
B. Kerangka Teoritis.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasionalisasi Penelitian	31
1. Subjek Penelitian	31
2. Jumlah Informan.....	31
3. Pemilihan Informan	31
4. Jenis Data.....	32
5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	33
6. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM KALURAHAN PUCUNG	37
A. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi.....	37

B. Pertanahan dan Tata Ruang	39
C. Kependudukan.....	40
D. Potensi Wilayah	42
E. Sarana dan Prasarana	45
F. Gambaran Kemiskinan dan Program Bantuan Sosial di Kalurahan Pucung	45
BAB V PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KALURAHAN PUCUNG	52
A. Dampak Program Bantuan Sosial	52
B. Kendala Penetapan Sasaran dan Pelaksanaan	74
C. Solusi Pemerintah kalurahan dalam Mengatasi Kendala	87
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan kompleks dan multidimensional yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, kepemilikan aset, serta akses terhadap tanah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), tingkat kemiskinan nasional di Indonesia yang tinggal di pedesaan mencapai 11,34%. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja produktif. Namun kondisi di tingkat lokal jauh lebih mengkhawatirkan dimana Kabupaten Gunungkidul mencatat angka kemiskinan 14,15% pada 2025 (turun dari 15,18% di 2024), memengaruhi 113.470 jiwa, atau gap 2,81% lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Kemiskinan di tingkat lokal tidak hanya diukur melalui pendapatan atau garis kemiskinan nasional, tetapi juga melalui kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, kepemilikan aset, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Tingkat kemiskinan ini dikategorikan oleh Pemerintah berdasarkan Desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagaimana diatur dalam SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2020. Desil 1 mewakili 10% rumah tangga termiskin (sangat miskin), Desil 2 mencakup 10-20% rumah tangga termiskin (miskin), Desil 3 adalah kelompok 20-30% rumah tangga termiskin (hampir miskin), dan Desil 4 merupakan 30-40% rumah tangga termiskin (rentan miskin). Rumah tangga yang termasuk dalam Desil >4 digolongkan sebagai kondisi mampu hingga sangat mampu (Hernawan et al., 2025). Hal ini sejalan dengan Kabupaten Gunungkidul yang memberikan bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kabupaten Gunungkidul, khususnya wilayah selatan seperti Kapanewon Girisubo, yang secara geografis dan demografisnya yang

representative terhadap tantangan kemiskinan di wilayah Gunungkidul bagian selatan. Wilayah ini tergolong daerah kering dan bergantung pada sektor pertanian tadah hujan yang rentan kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh musim sehingga bersifat tidak menentu dan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi demikian, masyarakat miskin menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memiliki keterbatasan aset produktif yang menyebabkan kemiskinan sulit direduksi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program bantuan sosial menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang berperan membantu rumah tangga miskin mengurangi beban pengeluaran dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar ketika pendapatan dari sektor pertanian menurun. (Herlon et al., 2023) menegaskan bahwa tanah merupakan aset lokal strategis yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat pedesaan apabila dikelola dan dimanfaatkan secara produktif. Pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal, khususnya tanah, dipandang sebagai pendekatan yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, baik yang menjalankan usaha di sektor pertanian, perkebunan maupun usaha mikro kecil dan menengah.

Ketimpangan kepemilikan atas tanah oleh petani mencerminkan situasi dalam sektor agraria dan menggambarkan struktur kemiskinan yang dialami oleh petani, dimana masalah kemiskinan di wilayah pedesaan adalah tingginya angka petani yang tidak memiliki lahan dengan ukuran yang cukup untuk menjalankan usaha pertanian atau bahkan ada yang tidak sama sekali memiliki lahan (Earlene et al., 2023). Hal ini menyebabkan petani miskin sulit meningkatkan pendapatan, sehingga banyak rumah tangga sangat bergantung pada bansos. Sebagai bentuk upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas utama pemerintah di berbagai tingkatan, pemerintah melaksanakan berbagai program bantuan sosial (bansos) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) maupun Dana Desa (DD).

Pemberian bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukan merupakan suatu hal baru. Berbagai program bantuan sosial serta subsidi telah dijalankan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi tanggungan, dan meningkatkan kualitas hidup warga negara yang kurang mampu (Jaya, 2024). Pemerintah Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul melaksanakan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi rendah sebagai upaya membantu meringankan beban ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian bantuan ini diharapkan akan dapat membantu keluarga tersebut dalam meningkatkan kualitas taraf hidup. Berbagai upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dimana Pemerintah kalurahan Pucung berperan dalam pelaksanaan, fasilitasi, serta pengelolaan implementasi tiga jenis program bansos utama, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yaitu kalurahan berperan lebih pada validasi dan pemutakhiran data (DTKS) serta pengawasan penyaluran, bekerja sama dengan pendamping sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program yang sepenuhnya dikelola oleh Kalurahan, mulai dari penentuan kriteria, penetapan melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal), hingga penyaluran. BLT-DD berfungsi sebagai mekanisme residual yang fleksibel untuk menjangkau warga miskin yang belum tercover program pusat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT). Komponen penerima PKH meliputi tiga kelompok utama yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia

0–6 tahun yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan. Komponen pendidikan meliputi anak usia 7-15 tahun yang harus terdaftar pada kegiatan pendidikan. Sementara itu, komponen kesejahteraan sosial mencakup lansia mulai dari usia 60 tahun serta penyandang disabilitas berat yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Heryuni et al., 2024).

Sementara itu, BPNT merupakan program pengembangan dari subsidi Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2016 yang merupakan bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), dengan kriteria keluarga penerima manfaat memiliki kondisi sosial ekonomi 25% terendah di wilayah tersebut. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada keluarga penerima manfaat dalam bentuk bahan pangan pokok seperti beras, gula, tahu, kentang, daging sapi, daging ayam, dan telur yang disalurkan setiap bulan. Bantuan tersebut memiliki nilai sebesar Rp200.000 yang ditransfer melalui rekening masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, dana tersebut dapat digunakan untuk memperoleh bahan pangan melalui e-warung atau lembaga perbankan yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam proses penyalurannya. Bantuan BPNT tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai, melainkan hanya dapat ditukarkan dengan kebutuhan bahan pangan pokok (Sasmita & Ari, 2022).

BLT DD merupakan bantuan bagi warga kurang mampu yang berasal dari dana desa yang disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga yang menjadi penerima manfaat dengan syarat yang telah disepakati dan ditentukan melalui musyawarah desa. Dalam aturan penggunaan Dana Desa tahun 2022, BLT DD termasuk dalam instrumen guna mencapai desa yang bebas dari kemiskinan dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, sesuai ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Mekanisme pengaturan BLT DD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 dan Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2020 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam merespons dampak pandemi COVID-19. Hingga tahun 2022, total anggaran bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp22,48 triliun dan diberikan kepada lebih dari 12,49 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia (Kemendes PDTT, 2022). Alokasi BLT DD berkisar 25%-35% dari total dana yang diterima oleh masing-masing desa (Sumedang et al., 2024).

Menurut Sasnita & Yeni Sri (2022) dalam (Nabillah et al., 2023) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan dua bentuk inisiatif yang mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya menangani permasalahan. Menurut Luthfi (2019, (Nabillah et al., 2023)) untuk meningkatkan taraf hidup dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, kedua inisiatif ini bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan secara langsung kepada masyarakat rentan dan miskin.

Program bantuan sosial tersebut, berdampak pada reduksi kemiskinan dalam jangka pendek, terutama BLT-DD yang berdampak pada beberapa aspek diantaranya:

- a. Peningkatan Daya Beli (*Preventive Function*): Bantuan tunai (PKH dan BLT-DD) secara langsung meningkatkan kemampuan konsumsi rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pangan dasar. Hal ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*safety net*) yang mencegah rumah tangga miskin dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih ekstrem.
- b. Perbaikan Indikator Dasar: PKH mendorong penerima untuk rutin memeriksa kesehatan ibu dan anak serta menyekolahkan anak, yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan *human capital*.
- c. Akselerasi Kebutuhan Non-Pangan: Sebagian penerima manfaat dilaporkan menggunakan dana bantuan untuk perbaikan rumah sederhana, pembelian seragam sekolah, atau alat usaha kecil, yang

menunjukkan adanya upaya pemenuhan kebutuhan sekunder yang mendesak. Sebagai contoh, penerima manfaat menyatakan, bahwa uang BLT-DD sangat membantu saat musim kemarau, karena hasil panen berkurang. Bantuan ini menyelamatkan mereka dari berutang untuk membeli beras (Pangera et al., 2025).

Meskipun program bantuan sosial telah berjalan secara berkelanjutan, evaluasi mengenai sejauh mana program-program tersebut berdampak pada reduksi kemiskinan di tingkat kalurahan masih relatif terbatas. Di Kabupaten Gunungkidul, terjadi pencoretan 988 keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2025 akibat ketidaksesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi riil di lapangan. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam penetapan sasaran bantuan sosial di tingkat kalurahan yang memerlukan kajian mendalam. (Harianjogja.com, 29 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan adanya salah satu tantangan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan dan koordinasi implementasi ketiga program bantuan sosial (PKH, BPNT, dan BLT-DD) di tingkat pemerintah kalurahan dalam konteks wilayah agraris kering seperti Kalurahan Pucung. Padahal, kalurahan bertanggung jawab atas validasi data DTKS sekaligus menetapkan penerima BLT-DD melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal).

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mekanisme penetapan sasaran dan dampak program Bansos terhadap kemiskinan lokal. Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran efektivitas program Bansos dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Pucung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Dampak Program Bantuan Sosial yang Dikelola Pemerintah kalurahan Terhadap Reduksi Kemiskinan (Studi di**

Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul)”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana dampak program bantuan sosial yang dikelola pemerintah kalurahan terhadap reduksi kemiskinan di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mekanisme penetapan sasaran dan pelaksanaan program bantuan sosial yang dikelola pemerintah kalurahan di Kalurahan Pucung?
3. Apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan untuk mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan dampak program bantuan sosial terhadap reduksi kemiskinan di Kalurahan Pucung?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak program bantuan sosial yang dikelola pemerintah kalurahan terhadap reduksi kemiskinan di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mekanisme penetapan sasaran dan pelaksanaan program bantuan sosial yang dikelola pemerintah kalurahan di Kalurahan Pucung.
- c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan untuk mengatasi kendala yang dihadapi guna meningkatkan dampak program bantuan sosial terhadap reduksi kemiskinan di Kalurahan Pucung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi ATR/BPN untuk memperkuat pemanfaatan informasi pertanahan sebagai data pendukung dalam identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial.

b. Politeknik Agraria STPN

Memperkaya pengetahuan baru terutama di bidang sosiologi pedesaan yang memberikan gambaran nyata tentang dampak program bantuan sosial terhadap reduksi kemiskinan di tingkat desa. Selain itu, memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk menguji, mendukung, atau memodifikasi teori-teori pembangunan sosial, reduksi kemiskinan, dan kebijakan bantuan sosial, khususnya dalam konteks wilayah pedesaan.

c. Pemerintah kalurahan Pucung

Penelitian ini membantu memberikan gambaran yang jelas tentang apakah program bantuan sosial sudah berjalan tepat sasaran dan benar-benar membantu mengurangi kemiskinan. Selain itu, memberikan referensi terkait dampak program bantuan sosial yang dikelola pemerintah kalurahan Pucung. Informasi penelitian ini dapat dijadikan pemerintah kalurahan sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan program bantuan sosial yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

d. Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan akademik dan meningkatkan kemampuan dalam meneliti, menganalisis masalah, dan menulis secara ilmiah khususnya terkait dampak program bantuan sosial pemerintah kalurahan Pucung terhadap reduksi kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian juga digunakan sebagai penyusunan tugas akhir studi (Skripsi).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wahyudi Zein, Nurul Hikmah Pasaribu, & Sukma Anggriani. (2025). Evaluasi Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Perdesaan. *Menawan: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(4), 36–45. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1526>
- Akbar, B. (2025). *Bab Ii Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Dan Hipotesis 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Pembangunan Manusia 2.1.1.1 Teori Pembangunan Manusia*.
- Arnowo, H. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. *Tunas Agraria*, 8(1), 113–128. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.408>
- Atri Komalasari, M. (2019). Kapabilitas Manusia Dan Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat : Suatu Upaya Mengatasi Kesenjangan *Human Capability And Social Capital Utilization In Community Empowerment : An Effort To Overcome The Gap. Vol. 43, No.2, 153-164*
- Banjaranyar, K., Ciamis, K., Jawa Barat, P., Sihalohe, M., Sita Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, R., & Ekologi Manusia, F. (2021). Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan *The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household Welfare (Case: Ex-HGU Land in Pasawahan Village, Banjaranyar District, Ciamis Regency, West Java)*. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* |, 05(02), 2021–2433. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.726>
- Earlene, F., Djaja, B., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, J. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia *Implications of agrarian reform policies on land ownership inequality through the lens of human rights*. 6(2), 152–170.
- Fauziah, A., Kirana, M., Pramoadasari, J., Purba, A., Riyanto, O., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (n.d.). *Pengaruh Program Bantuan Sosial terhadap Pengurangan Kemiskinan Petani di Desa Pamong*.
- Herlon, M., Ridho, Z., Sri Rahayu, W., Studi Agribisnis, P., Pertanian, F., Riau, U., Lancang Kuning, U., Pelalawan Riau Kampus Bina Widya, B. K., Baru, S., Bina widya, K., Pekanbaru, K., & ARTIKEL Histori Artikel, I. (2023). *Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kepemilikan Lahan*

- di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 25(1).
<https://doi.org/10.31849/agr.v25i1.16351>
- Hermawati, I., Kusnali, A., Witono, T., Muhammad, A., & Saryana, S. (2024). Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. *Sosio Konsepsia*, 14(1).
<https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3501>
- Hernawan, F., Negara, A., Yppt, S., & Tasikmalaya, P. (2025). *Perencanaan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Mandalahayu Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya*.
- Heryuni, P. F., Ari, S., & Sri, S. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. 13, N.
<https://doi.org/10.14710/Jppmr.V13i4.47477>
- Istiyawan, A. (2025). Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan: Sebuah Literature Review. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2).
- Jaya, P. (2024). *Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta*. 1–2.
- Krismiyaningsih, E., Sagala, S., Fitrinitia, I. S., Zahra, R. A., & Darmawan, A. B. (2024). Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 4(1).
<https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.180>
- Murajid, A., Hasan, M., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, F. (2022). Analisis Dampak Program Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Pada Implementasi BLT). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(2), 2022. <https://ojs.unm.ac.id/JE3S>
- Nabillah, J. L., Saputra, R., Ali, H., & Mahaputra, M. R. (2023). Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 1(4), 140–152.
- Nugroho, A. (2025a). *Riset Agraria dengan Metode Penelitian Kualitatif* (Adhar, Ed.). Tangguh Denara Jaya Publisher.

- Pangera, A. Muh. F. High. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(3), 3580–3592. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3171>
- Panjaitan Azmi, N., Susanti, N., & Jailani, M. (2023). *Dampak Implementasi Adat Pemberian Kain Serta Tepung Tawar Pada Tradisi Upah-Upah Upacara Pernikahan Terhadap Nilai Integrasi Sosial. Volume 3 Nomor 3*. <https://ejournal.yana.or.id/index.php/algebra>
- Purba Br Febina, G., Sinulingga.C.M, D., Togatorop, J., & Harahap Muda, L. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan : Evaluasi Dari Berbagai Penelitian. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 4(1), 108–117. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956>
- Rizki Zul Arfandi, & Sumiyarti. (2022). Analisis Pembagian Manfaat Atas Program Bantuan Sosial Di Indonesia Tahun 2018. *Media Ekonomi*, 30(1), 1–15. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.10304>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Number 4). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>
- Sasmita, A., & Ari, N. (2022). Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Kemiskinan Di Kelurahan Parit Rantang Kota Payakumbuh. 5.
- Saniah, S., & Afrizal, S. (2024). Transformasi Sosial Penerima Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Desa Cipayung. *Volume 7 Nomor 1*. 829-836.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode *Qualitative Description as one Method in Performing Arts Study*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Sumedang, K., Mardhotillah, A., Firmansyah, R. R., Sisilia, D., Septiawan, H., & Sya, I. (2024). Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Desa Citali Kecamatan Pamulihan. 15, 25–39.
- Suyasa, I. M. G., Retnosari, L., & Taufiq, N. (2022a). Tepatkah Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia? *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 4(1). <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.156>

Urfan, N. F., Arisanto, P. T., Wibawa, A., Karim, A. M., Siliwangi, J., & Yogyakarta, D. I. (2024). *Paradigma Dasar Dalam Kajian Ilmu Sosial*. 2(1), 231–238. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i1.150>

Wijanarko Akhsani, A., & Rustianingsih, E. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto*. Volume: 5, No. 1.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). Poverty reduction and pro-poor growth: The role of empowerment. <https://doi.org/10.1787/9789264168350-en>

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Presiden Republkt Indonesia

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 dan Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020.

Peraturan Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang RPKPKAL Tahun 2025